

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat daerah yang dibentuk karena terdapatnya urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah dimana urusannya berupa pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. masing-masing daerah membentuk perangkat daerah dengan mempertimbangkan bagaimana potensi yang dimiliki serta apa yang dibutuhkan oleh daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan adanya Peraturan Daerah yang berpatokan terhadap Peraturan Pemerintah. pembagian Perangkat daerah ini terdiri atas perangkat di daerah provinsi dan perangkat di daerah kabupaten/kota. Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu dalam melakukan penyelenggaraan kepada pemerintah daerah. Salah satu OPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

BPKAD merupakan salah satu OPD yang melaksanakan urusan penunjang Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan serta aset daerah. Semua aset tetap di sebuah instansi memerlukan pemeliharaan yang baik dan benar. Pemeliharaan yang dilakukan memerlukan biaya supaya aset bisa digunakan sesuai kebutuhan. Biaya tersebut dilakukan untuk pemeliharaan dan perawatan aset sehingga bisa memberikan manfaat aset serta meningkatkan kualitas produksi. Aset tetap memberikan pengaruh kepada kegiatan operasional di semua instansi pemerintah untuk mencapai kegiatan operasional yang efektif yang mendukung pencapaian tujuan dari sebuah instansi. Aset tetap yang digunakan dalam instansi berupa peralatan, alat dan mesin, tanah serta bangunan. Di setiap instansi aset memiliki tempat yang penting terhadap jumlah aset dalam perusahaan secara menyeluruh (Warren 2008, p.440).

Maka dari itu untuk menjaga agar aset tetap tertata dengan baik maka sebuah instansi perlu melakukan pengendalian internal dalam pengelolaan aset secara profesional mulai dari tahap perencanaan, pemeliharaan dan

pelaporannya. Pengendalian internal yang dilakukan dengan benar akan memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang merupakan cerminan nilai asset dalam sebuah perusahaan tersebut. Messier (2009) mengatakan, arti dari pengendalian internal yaitu berbagai proses yang dilakukan direksi, manajemen, petugas lainnya yang dirancang untuk meyakinkan bahwasanya suatu kegiatan operasional telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan (PSAK No 14), asset tetap merupakan aset yang memiliki wujud yang perolehannya dalam bentuk siap pakai bisa juga dengan dibangun lebih awal yang dipakai untuk kegiatan operasional dalam perusahaan, bukan untuk dijual dalam berbagai kegiatan perusahaan yang bermanfaat lebih dari satu tahun. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009), asset tetap merupakan asset yang memiliki wujud untuk digunakan dalam kegiatan produksi serta untuk disewakan kepada pihak yang ingin menggunakannya dan diharapkan penggunaannya lebih dari satu periode.

Pengendalian berguna untuk melindungi asset dari berbagai kejahatan seperti salah guna asset, pencurian asset, serta asset yang ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Penting untuk menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang efektif atas asset tetap dikarenakan asset tetap memiliki nilai yang tinggi dan umur ekonomis yang panjang (Warren, 2008, p.440). Pada pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 /PMK.06/2014 yang berisikan Perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/ PMK.06/ 2013 mengenai BMN yang disusutkan berupa asset tetap di sebuah pemerintah pusat yang berbunyi: asset tetap yang dapat disusutkan berupa gedung dan bangunan kemudian mesin dan peralatan lalu jalan, irigasi, dan jaringan serta asset berupa asset tetap lainnya. Adapun asset yang dinyatakan hilang sesuai dengan sumber dokumen yang diusulkan ke bagian pengelola barang untuk melakukan penghapusan tidak akan diakui penyusutannya.

Pengelolaan asset tetap yang dicantumkan dalam neraca memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan BMN/D. yang cakupannya berupa: melakukan perencanaan terlebih dahulu setelah itu melakukan penganggaran, pengadaan, kemudian menerima, menyimpan dan menyalurkan asset setelah itu melakukan pemeliharaan terhadap asset tersebut. Lalu

jika tidak sesuai lagi atau tidak layak pakai maka bisa dilakukan penghapusan dan pemindahtanganan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPKAD kesulitan terbesar dalam penyusunan neraca terkait dengan asset tetap karena banyaknya jumlah asset tetap yang dimiliki. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada asset tetap misalnya dalam pengamanan dan pemeliharaan asset tetap yang kurang. Adapun faktor yang menimbulkan adanya permasalahan yang berhubungan dalam melaporkan asset tetap yaitu sistem pengendalian internal melemah serta kekurangan SDM yaitu secara kualitas ataupun secara kuantitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah harus ikut andil dalam perbaikan kualitas maupun kuantitas dalam pengadaan sumber daya manusia dalam hal penyusunan laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan asset tetap.

Menurut kepala BPKAD Kota Padang (dalam Indowarta, 2009) Badan Pengelolaan keuangan dan asset kota padang terpaksa melakukan inventarisir asset sebanyak dua kali pada tahun 2009, serta pemberian opini dari BPK atas audit laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang yang tidak terlepas dari permasalahan asset tetap yang belum tertata dengan baik. Dari pernyataan tersebut, penatausahaan yang dilakukan belum optimal terhadap asset, yang menyebabkan pemerintahan daerah kesulitan memahami dengan nyata pengelolaan dari asset tersebut, sehingga asset tersebut tidak optimal dalam penggunaannya, namun demikian Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemanfaatan asset di masa depan. Hal ini juga mempengaruhi keakuratan nilai asset yang tersaji di neraca pemerintahan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas masalah pengendalian internal yang dilakukan terhadap asset tetap sebagai bentuk implikasi ilmu yang telah didapatkan selama bangku kuliah, yang dimasukkan dalam sebuah laporan magang yang berjudul **“PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap asset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis membuat tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian internal terhadap aktiva tetap/ asset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

Bisa meningkatkan wawasan sebagai *platform* untuk menerapkan teori-teori yang di dapatkan selama bangku kuliah terhadap masalah sesungguhnya di dunia pekerjaan. Dan menambah pengetahuan mengenai pengendalian internal pemerintahan terhadap asset tetap khususnya pada instansi pemerintah. Selain itu, Tugas Akhir ini ditulis sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.

2. Bagi instansi

Tugas akhir ini dapat membantu pemimpin dalam melakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada asset tetap. Serta menjalin hubungan baik antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Universitas.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca akan mendapatkan manfaat diantaranya untuk menambah pengetahuan, serta menjadi sumber referensi dalam membuat Tugas Akhir dimasa selanjutnya. Dan mendapatkan tambahan informasi serta masukan

dalam pengembangan masalah dan solusinya yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melakukan magang guna memenuhi mata kuliah wajib, sehingga penulis melaksanakan magang yang sejalan dengan judul Tugas Akhir Penulis yaitu “Pegendalian Internal Terhadap Aset Tetap pada Badan Pengeelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketentuan bagi pihak akademik.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematikan penulisan yang penulis buat guna memudahkan pembahasan dalam laporan magang antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

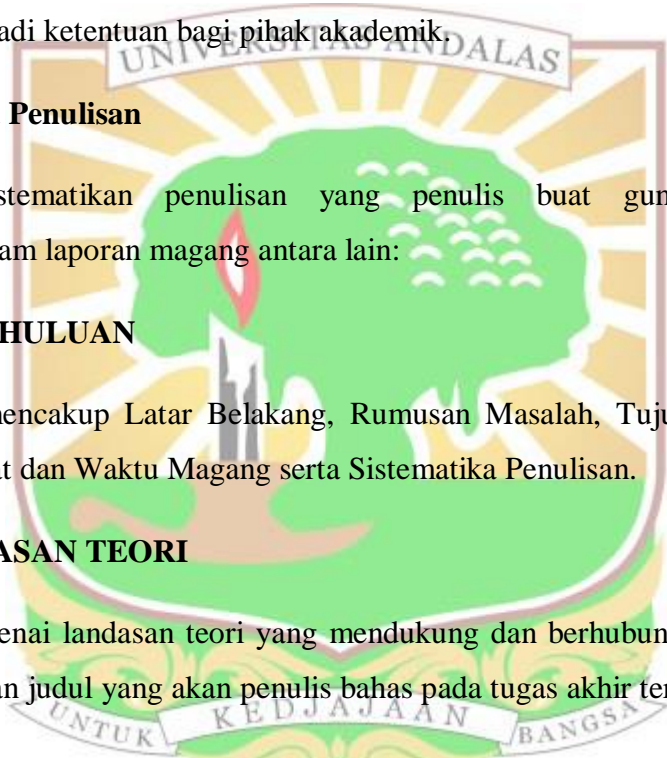
Pada bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Magang, Tempat dan Waktu Magang serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan teori inti. Sesuai dengan judul yang akan penulis bahas pada tugas akhir tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Menggambarkan tentang kondisi umum perusahaan yang berhubungan dengan sejarah singkat BPKAD Kota Padang, Visi dan Misi BPKAD Kota Padang, serta Struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai BPKAD Kota Padang.



BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai masalah dari hasil yang diperoleh pada saat magang mengenai **“Pengendalian Internal Terhadap Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.



